

LAPORAN KINERJA (LKJ) PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

2020

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

BAPPENAS

**Pusat
Pembinaan,
Pendidikan,
dan Pelatihan
Perencana**

**Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional**

LAPORAN KINERJA (LKJ) PUSBINDIKLATREN BAPPENAS

2020

**Pusat
Pembinaan,
Pendidikan,
dan Pelatihan
Perencana**

Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia (SDM)	6
E. Isu-isu Strategis	8
F. Alokasi Anggaran	9
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	11
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja	19
B. Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) 2019	20
C. Tindak Lanjut Rekomendasi Kegiatan Tahun 2019	29
D. Inovasi Pusbindiklatren Tahun 2020	30
BAB IV. PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Rekomendasi 2020 untuk Rencana Aksi 2021	37
LAMPIRAN	39
Lampiran 1: Jumlah JFP yang Memenuhi Standar Kompetensi	40
Lampiran 2: Jumlah Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan	41
Lampiran 3: Jumlah Peserta Terlatih	42
Lampiran 4: Tingkat Kepuasan Pelayanan Diklat dan JFP	44

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kebutuhan Pendidikan Bagi Perencana Berkualitas Tingkat Nasional Tahun 2006	11
Tabel 2.2	Kebutuhan Pelatihan Bagi Perencana Berkualitas Tingkat Nasional Tahun 2006	12
Tabel 2.3	Pelaksanaan Program Pendidikan Pusbindiklatren	13
Tabel 2.4	Pelaksanaan Pelatihan Pusbindiklatren Tahun 2006–2020	13
Tabel 2.5	Rencana Kelulusan Karyasiswa	14
Tabel 2.6	IKU Pusbindiklatren 2020	15
Tabel 3.1	Realisasi Kinerja Pusbindiklatren 2020	20
Tabel 3.2	Perbandingan Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020	21
Tabel 3.3	Perbandingan Tingkat Kelulusan Karyasiswa Pendidikan 2019 dan 2020	22
Tabel 3.4	Perbandingan Penyelenggaraan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 dan 2020	23
Tabel 3.5	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan 2019 dan 2020	24
Tabel 3.6	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan 2019 dan 2020	24
Tabel 3.7	Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana 2019 dan 2020	25
Tabel 3.8	Realisasi Anggaran 2020	26
Tabel 3.9	Realisasi Anggaran Per Penanggung Jawab	27
Tabel 3.10	Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 dan 2020	29
Tabel 3.11	Tindak Lanjut Rekomendasi 2019	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas	6
Gambar 2.1	Pemetaan <i>Cascading</i> IKU Pusbindiklatren 2018	16
Gambar 2.2	Proses Bisnis Pusbindiklatren	17

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Perbandingan Jumlah PNS dan PTT	6
Grafik 1.2	Sebaran PNS	8

BAB I.

PENDAHULUAN



A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 menyebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan dilaksanakan melalui penguatan implementasi manajemen aparatur sipil negara (ASN). Beberapa kegiatan terkait penguatan implementasi manajemen ASN antara lain penerapan manajemen talenta nasional ASN, peningkatan sistem merit ASN, penyederhanaan eselonisasi, serta penataan jabatan fungsional. Dalam upaya mendukung arah kebijakan tersebut, diperlukan pengembangan dan pembinaan ASN perencana melalui program pendidikan maupun program pelatihan (non-gelar) serta kegiatan lainnya di bidang perencanaan pembangunan.

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas menyebutkan bahwa Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana (selanjutnya disebut Pusbindiklatren) mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana (JFP), dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Adapun fungsi Pusbindiklatren adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencana pembangunan dan pembinaan profesi JFP di pusat dan daerah.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Pusbindiklatren menyelenggarakan program beasiswa pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemerintah yang bekerja pada unit kerja perencanaan maupun unit kerja pendukung perencanaan pembangunan dan melakukan pembinaan JFP yang meliputi perumusan kebijakan, pengembangan karier, dan fasilitasi pembinaan JFP.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2019, Pasal 563, menyebutkan bahwa Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi dan pembinaan JFP, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Sementara pada Pasal 564, Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana menyelenggarakan fungsi

1. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan;
2. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah;
3. pembinaan profesi Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN / Bappenas;
4. penyusunan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
5. penyusunan program pembinaan, pendidikan, dan pelatihan perencanaan;
6. perencanaan dan pengembangan materi pendidikan dan pelatihan perencanaan;
7. pengoordinasian dan penyelenggaraan kegiatan, pembinaan, pendidikan, dan pelatihan;
8. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana serta pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan;
9. pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit Jabatan Fungsional Perencana, pengelolaan informasi Jabatan Fungsional Perencana, dan pengelolaan informasi serta pelayanan perencana;
10. pengoordinasian kegiatan pejabat fungsional perencana dan widyaiswara di Kementerian PPN/Bappenas;
11. pelaksanaan administrasi pusat; dan
12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Pusbindiklatren dibantu oleh empat Kepala Bidang dan satu Kepala Subbagian Tata Usaha. Setiap Kepala Bidang dibantu oleh dua Kepala Subbidang. Tugas dan fungsi Kepala Bidang dan Kepala Subbagian Tata Usaha sebagai berikut.

1. Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan

Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi, standar, serta pengembangan sarana, prasarana, dan sistem informasi perencanaan. Dalam menjalankan tugasnya bidang ini menyelenggarakan fungsi

- a. perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi, dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- b. perencanaan dan pengembangan sistem informasi dan layanan informasi pendidikan dan pelatihan perencanaan;
- c. pelaksanaan evaluasi kebijakan teknis, program dan materi, pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan laporan perencanaan dan pengembangan kebijakan teknis, program, materi, dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan dibantu oleh dua Subbidang, yaitu

- a. **Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, materi, dan standar pendidikan dan pelatihan perencanaan; dan
- b. **Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana, Informasi dan Layanan Pendidikan dan Pelatihan**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana, dan sistem informasi dan pelayanan informasi terkait pendidikan dan pelatihan perencanaan.

2. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana mempunyai tugas melaksanakan persiapan, penyelenggaraan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembinaan, pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Perencana, serta pengembangan Jabatan Fungsional Perencana pusat dan daerah termasuk fungsional perencana di Kementerian PPN/Bappenas. Bidang ini menyelenggarakan fungsi

- a. penyelenggaraan dan pengoordinasian kegiatan pelatihan penjurangan Jabatan Fungsional Perencana;
- b. pelaksanaan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana pusat dan daerah;
- c. pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit perencana pusat dan daerah;

- d. pelaksanaan layanan dan konsultasi Jabatan Fungsional Perencana;
- e. fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian PPN/ Bappenas;
- f. pemantauan, evaluasi, penilaian, dan pelaporan serta saran tindak lanjut terhadap pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Perencana; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana dibantu oleh dua Subbidang, yaitu

- a. **Subbidang Pengembangan dan Penilaian Jabatan Fungsional Perencana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan kelembagaan dan regulasi Jabatan Fungsional Perencana dan pelaksanaan akreditasi dan penilaian angka kredit bagi perencana pusat dan daerah, serta pelaksanaan akreditasi dan penilaian pengajar dan lembaga pelaksana Pendidikan dan pelatihan penjenjangan Jabatan Fungsional Perencana, dan melakukan pemantauan dan evaluasi serta pelaporannya.
- b. **Subbidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana**, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan profesi, fasilitasi, pelayanan informasi dan konsultasi bagi perencana pusat dan daerah, serta memfasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Widyaiswara di Kementerian Perencanaan PPN/ Bappenas.

3. Bidang Penyelenggaraan Pendidikan

Bidang Penyelenggaraan Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta pendidikan baik di dalam maupun luar negeri di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Bidang ini menyelenggarakan fungsi

- a. persiapan pelaksanaan seleksi peserta sesuai persyaratan, kriteria, dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis pendidikan;
- b. pelaksanaan persiapan peserta pendidikan;
- c. pelaksanaan penempatan peserta di perguruan tinggi pelaksana pendidikan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pendidikan;
- e. penyusunan laporan kegiatan seleksi, persiapan, dan penempatan peserta, serta laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendidikan baik di dalam maupun luar negeri; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dibantu oleh dua Subbidang, yaitu

- a. **Subbidang Pengelolaan Pendidikan**, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan program gelar di dalam dan di luar negeri, dan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. **Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan**, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemantauan dan evaluasi pendidikan serta bahan penyusunan laporan kegiatan.

4. Bidang Penyelenggaraan Pelatihan

Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pelatihan, baik di dalam maupun luar negeri, di bidang perencanaan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya. Bidang ini menyelenggarakan fungsi

- a. persiapan pelaksanaan seleksi peserta sesuai persyaratan, kriteria, dan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing jenis pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan persiapan peserta pelatihan;
- c. pelaksanaan penempatan peserta di pelaksana pelatihan;
- d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaksanaan pelatihan; dan
- e. penyusunan laporan kegiatan seleksi, persiapan dan penempatan peserta, serta laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bidang Penyelenggaraan Pelatihan dibantu oleh dua Subbidang, yaitu.

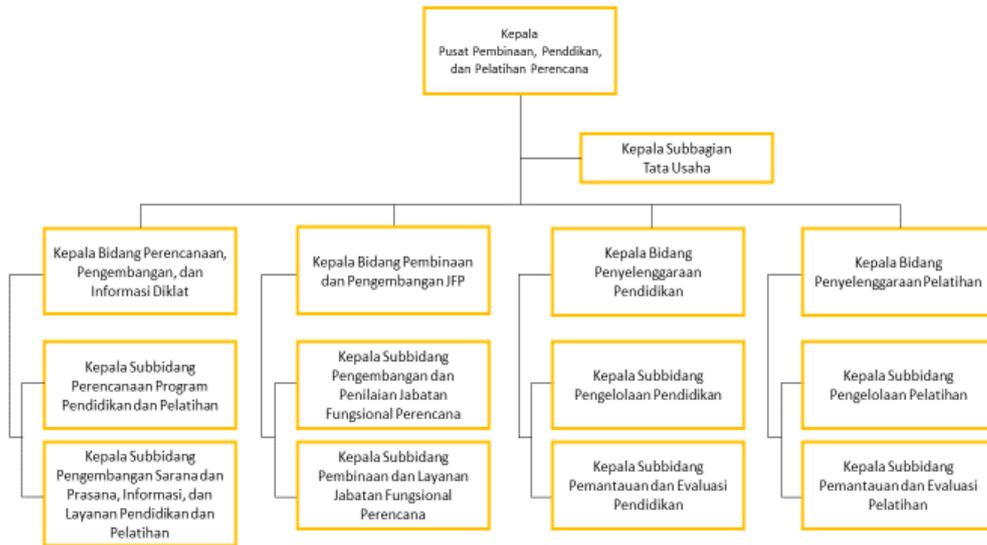
- a. **Subbidang Pengelolaan Pelatihan**, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan seleksi, persiapan dan penempatan peserta pendidikan dan pelatihan di dalam dan luar negeri, dan bahan penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. **Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan**, mempunyai tugas melakukan persiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelatihan dan bahan penyusunan laporan kegiatan.

5. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan dan tata kelola kegiatan serta melaksanakan urusan persuratan, dokumentasi, perlengkapan, dan rumah tangga bagi Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana.

Berikut gambar struktur organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas.

Struktur Organisasi Pusbindiklatren Bappenas

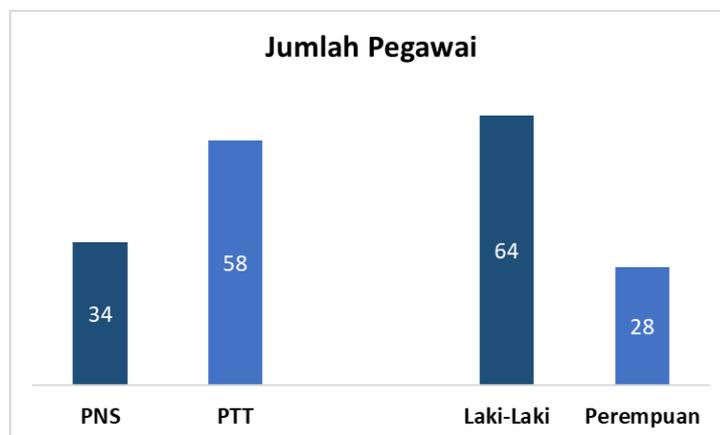


* Berdasarkan PERMENPPN/KABAPPENAS No. 9 Tahun 2019

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas (Permen PPN/Ka. Bappenas No. 9/Tahun 2019)

D. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

SDM yang mendukung tugas dan fungsi Pusbindiklatren sebanyak 92 orang yang terdiri atas 34 orang atau sekitar 37 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 58 orang atau sekitar 63 persen Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga kontrak. Sementara komposisi pegawai Pusbindiklatren berdasarkan jenis kelamin, sebanyak 64 orang atau sekitar 70 persen berjenis kelamin laki-laki, dan sebanyak 28 orang atau sekitar 30 persen berjenis kelamin perempuan. Komposisi SDM berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Grafik 1.1.



Grafik 1.1 Perbandingan Jumlah Pegawai Pusbindiklatren

PNS Pusbindiklatren dikelompokkan dalam beberapa jabatan, yaitu Pejabat Tinggi Pratama; Pejabat Administrator; Pejabat Pengawas; serta Pejabat Fungsional (Pejabat Fungsional Perencana, Pejabat Fungsional Widyaiswara, dan Pejabat Fungsional Arsiparis).

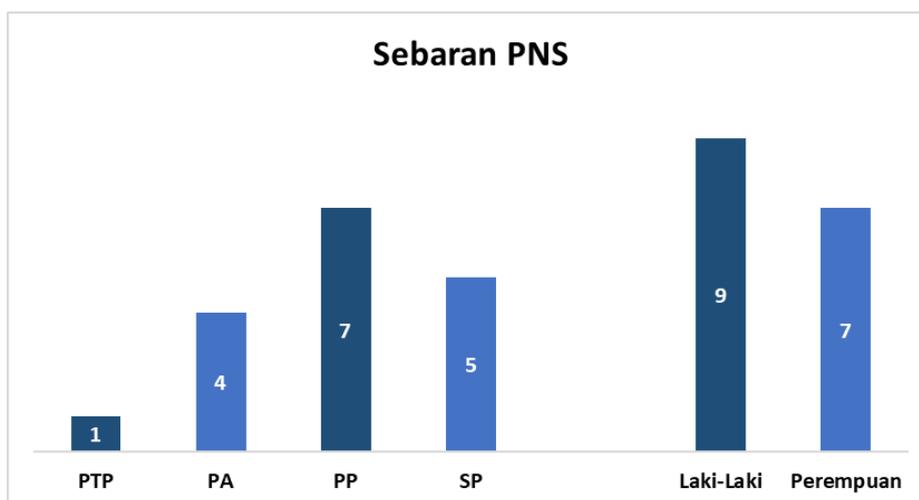
Pejabat Tinggi Pratama terdiri atas satu orang, yaitu Kepala Pusbindiklatren. Sementara **Pejabat Administrator** terdiri atas empat orang, yaitu (1) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan; (2) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana; (3) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan; dan (4) Kepala Bidang Bidang Penyelenggaraan Pelatihan.

Pejabat Pengawas terdiri atas sembilan orang, yaitu (1) Kepala Subbidang Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan; (2) Kepala Subbidang Pengembangan Sarana Prasarana, Informasi, dan Layanan Pendidikan dan Petatihan; (3) Kepala Subbidang Pengembangan dan Penilaian Jabatan Fungsional Perencana; (4) Kepala Subbidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana; (5) Kepala Subbidang Pengelolaan Pendidikan; (6) Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pendidikan; (7) Kepala Subbidang Pengelolaan Pelatihan; (8) Kepala Subbidang Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan, serta (9) Kepala Subbagian Tata Usaha.

Dari total sembilan Pejabat Pengawas dalam struktur organisasi Pusbindiklatren, masih terdapat dua jabatan yang belum terisi, yaitu Kepala Subbidang Pembinaan dan Layanan Jabatan Fungsional Perencana dan Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pejabat Fungsional Perencana terdiri atas delapan orang, yaitu (1) Perencana Madya sebanyak empat orang; (2) Perencana Muda sebanyak dua orang, dan (3) Perencana Pertama sebanyak dua orang. **Pejabat Fungsional Widyaiswara** terdiri atas enam orang, yaitu (1) Widyaiswara Utama sebanyak tiga orang; (2) Widyaiswara Madya sebanyak satu orang; dan (3) Widyaiswara Muda sebanyak dua orang. **Pejabat Fungsional Arsiparis** terdiri atas tiga orang, yaitu (1) Arsiparis Ahli Muda satu orang dan (2) Arsiparis Terampil dua orang. Sementara **Staf Pendukung** terdiri atas 2 orang staf perencana, 3 orang tata usaha, dan 1 orang pramubakti.

Saat ini PNS Pusbindiklatren yang ditempatkan di bidang-bidang sebanyak 16 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 9 orang dan perempuan 7 orang dengan rincian Pejabat Tinggi Pratama (1 orang), Pejabat Administrator (4 orang), Pejabat Pengawas (7 orang), dan Staf Pendukung (5 orang). Grafik 1.3 memperlihatkan perbandingan antara Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Staf Pendukung.



Grafik 1.2 Sebaran PNS
(PTP: Pejabat Tinggi Pratama; PA: Administrator;
PP: Pejabat Pengawas; SP: Staf Pendukung)

E. ISU-ISU STRATEGIS

Sebagai bagian dari Kementerian PPN/Bappenas, isu-isu strategis yang menjadi tantangan Pusbindiklatren meliputi beberapa hal berikut.

1. Isu strategis berkaitan dengan perubahan kerangka regulasi yang terkait dengan tugas dan fungsi (tusi) Pusbindiklatren yaitu; (i) perubahan Keputusan Menteri Aparatur Negara No. 16/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana dan Angka Kreditnya menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana; (ii) terbitnya Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Perencanaan Pembangunan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia; dan (iii) terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 tahun 2019 tentang Penyetaran Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional. Ketiga perubahan tersebut berimplikasi terhadap proses bisnis Pusbindiklatren khususnya terkait tusi pengembangan dan pembinaan JFP. Pusbindiklatren berkewajiban untuk segera dapat menuntaskan petunjuk teknis dan panduan operasional dari perubahan-perubahan aturan tersebut, sekaligus melaksanakan edukasi dan advokasi kepada pemangku kepentingan atas implikasi dari perubahan-perubahan tersebut dalam pengelolaan JFP ke depannya;
2. Isu strategis yang terkait dengan kerangka pendanaan untuk pembiayaan kegiatan pengembangan sumber daya manusia/aparatur sipil negara (ASN) bidang perencanaan pembangunan. Pelaksanaan tusi Pusbindiklatren terkait pendidikan dan pelatihan ASN bidang perencanaan serta pengembangan dan pembinaan JFP selama ini memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja

negara (APBN) dan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN) berbasis pengelolaan proyek. Semakin terbatasnya pendanaan yang berasal dari APBN/PHLN, perlu diantisipasi sedini mungkin oleh Pusbindiklatren agar program/kegiatan terkait fasilitasi pendidikan dan pelatihan dapat berkelanjutan. Peluang berkolaborasi dengan pihak non-pemerintah perlu dijajaki dan dieksplorasi untuk mendapatkan alternatif sumber pendanaan baru dalam melaksanakan tugas fasilitasi pendidikan dan pelatihan serta pengembangan dan pembinaan JFP.

3. Isu strategis terkait dengan teknis pelaksanaan tugas Pusbindiklatren.
 - a. *Ownership* dari instansi asal karyasiswa terhadap kinerja karyasiswa masih perlu terus ditingkatkan, khususnya dalam memastikan kinerja karyasiswa selama mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta kontribusinya kepada organisasi pasca-program/kegiatan. Pusbindiklatren melalui kegiatan Fasilitasi *Human Capital Development Plan* (HCDP) kepada kementerian/lembaga (K/L) dan daerah berupaya memastikan pengiriman karyasiswa dari instansi didasarkan atas dokumen kebutuhan pengembangan SDM/HCDP instansi; tujuannya agar proses *planning & recruitment* calon karyasiswa bisa seoptimal mungkin memenuhi kebutuhan organisasi.
 - b. Transisi dari pelatihan klasikal/konvensional menjadi pelatihan dalam jaringan (*daring/online*) adalah tantangan yang akan dihadapi Pusbindiklatren dalam pelaksanaan tugasnya pasca-pandemi Covid-19. Kualitas proses belajar-mengajar dalam pelatihan akan menjadi tantangan ke depannya. Pusbindiklatren perlu mempersiapkan kapasitas organisasi dalam pengelolaan program/kegiatan yang berbasis padat teknologi informasi.
4. Isu strategis lainnya terkait perubahan peran Pusbindiklatren di dalam Renstra Kementerian PPN/Bappenas 2020–2024. Adanya mandat dari presiden kepada Kementerian PPN/Bappenas sebagai *clearing-house* dalam proses perencanaan pembangunan berimplikasi terhadap Pusbindiklatren yang saat ini mendapatkan mandat sebagai *enabler* perencanaan pembangunan. Pusbindiklatren perlu menyiapkan desain program/kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan yang dapat akselerasi proses *clearing house*, sekaligus mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya melalui implementasi program/kegiatan afirmasi pendidikan dan pelatihan untuk ASN perencanaan pembangunan di daerah/sector tertentu.

F. ALOKASI ANGGARAN

Tahun anggaran 2020, Pusbindiklatren mengelola anggaran sebesar Rp183.348.216.000 yang terdiri atas (1) Rupiah Murni (RM) sebesar Rp37.795.711.000 dan Lintas Bidang sebesar Rp. 1.420.320.000; (2) Rupiah Murni Pendamping (RMP) Rp21.816.385.000; serta (3) Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp122.315.800.000 (*loan* PHRD IV Rp114.102.000.000 dan COREMAP-CTI Rp8.213.800.000).



BAB II. PERENCANAAN KINERJA



Dalam menentukan target sasaran pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pembangunan jangka pendek, menengah, dan panjang, Pusbindiklatren menggunakan data umum tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) perencana di seluruh Indonesia. Berdasarkan hasil survei umum yang dilakukan pada tahun 2006 di beberapa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota, didapatkan gambaran umum kondisi perencana di seluruh Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan dan keikutsertaan dalam pelatihan. Kebutuhan ASN perencana terhadap pendidikan ditunjukkan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Kebutuhan Pendidikan Bagi Perencana Berkualitas Tingkat Nasional Tahun 2006

Instansi/ Pemerintah	Σ Perencana Berdasarkan Tingkat Pendidikan				Σ Kebutuhan Perencana yang Harus Mengikuti Pendidikan		
	S1	S2	S3	JUMLAH	S2*	S3**	JUMLAH
PUSAT	5.496	1.237	137	6.870	4.122	62	4.184
PROVINSI	6.528	1.469	163	8.160	4.896	73	4.969
KAB/KOTA	98.688	22.205	2.467	123.360	74.016	1.110	75.126
TOTAL	110.712	24.910	2.768	138.390	83.034	1.246	84.280

**Asumsi 75 persen dari jumlah perencana lulusan S1 yang harus melanjutkan studi S2

***Asumsi 5 persen dari jumlah perencana yang lulus S2 yang harus melanjutkan studi S3

Sumber data diolah oleh Pusbindiklatren

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, kebutuhan perencana yang harus mendapat pendidikan secara total berjumlah 84.280 orang dengan rincian pendidikan S-2 sebanyak 83.034 orang dan S3 sebanyak 1.246 orang. Jumlah tersebut diambil dengan asumsi 75 persen ASN yang berpendidikan S-1 perlu ditingkatkan kompetensinya ke jenjang S-2 dan 5 persen dari ASN yang sudah menempuh pendidikan S-2 perlu melanjutkan pendidikan ke jenjang S-3.

Tabel 2.2 Kebutuhan Pelatihan bagi Perencana Berkualitas Tingkat Nasional Tahun 2006

Instansi/ Pemerintah	Σ Perencana	Σ Perencana yang <u>Pernah</u> Ikut Pelatihan *	Σ Perencana yang <u>Belum</u> Ikut Pelatihan	Σ Kebutuhan Perencana yang Harus Pelatihan**
PUSAT	6.870	3.529	3.341	2.673
PROVINSI	8.160	2.134	6.026	4.821
KAB/KOTA	123.360	6.277	117.083	93.666
JUMLAH	138.390	11.940	126.450	101.160

* Perencana yang pernah mengikuti pelatihan perencanaan Bappenas sejak 2000–2014.

**Asumsi kebutuhan perencana untuk pelatihan adalah 80 persen dari jumlah perencana yang belum mengikuti pelatihan

Sumber data diolah oleh Pusbindiklatren

Pada Tabel 2.2 di atas, kebutuhan perencana yang harus memperoleh pelatihan sebanyak 101.160 orang dengan perincian ASN khususnya PNS pusat sebanyak 2.673 orang, PNS provinsi sebanyak 4.821 orang, dan PNS kabupaten/kota sebanyak 93.666 orang. Berdasarkan kondisi jenjang pendidikan dan keikutsertaan perencana dalam pelatihan, secara umum dapat diasumsikan bahwa perencana tersebut secara kualitas lebih baik dibandingkan perencana yang belum mengikuti program pendidikan dan program pelatihan. Dengan demikian, pengertian perencana berkualitas adalah perencana yang telah menyelesaikan jenjang S-2 dan S-3 serta mengikuti program pelatihan.

Asumsi 75 persen (untuk pendidikan gelar) didasarkan pada kebutuhan peningkatan kompetensi PNS yang saat ini masih didominasi oleh PNS dengan jenjang S-1 sehingga untuk mencapai profesionalisme PNS maka peningkatan kompetensi difokuskan pada peningkatan jenjang pendidikan dari S-1 ke S-2, sedangkan asumsi kebutuhan untuk program S-3 hanya 5 persen.

Asumsi 80 persen (untuk pelatihan) didasarkan pada kebutuhan PNS yang dapat melaksanakan proses pembangunan, mulai dari tahap penyusunan dokumen perencanaan sampai dengan kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Untuk itu, kebutuhan pelatihan perencanaan pembangunan menjadi salah satu fokus dalam memenuhi kebutuhan PNS.

Kesenjangan jumlah PNS perencana berkualitas di pusat dan daerah seperti di atas diharapkan dapat dipenuhi sebagian oleh lembaga/instansi pemberi beasiswa seperti Bappenas, K/L, Pemda dan lembaga donor nasional/internasional lainnya.

Tabel 2.3 Pelaksanaan Program Pendidikan Pusbindiklatren

NO	PROGRAM	2006–2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
1	S2 Dalam Negeri	3.546	318	282	273	282	279	4.980
2	S2 <i>Linkage</i>	1.461	114	115	115	92	44	1.941
3	S2 Luar Negeri	402	171	6	6	13	0	598
4	S3 Dalam Negeri	41	6	6	0	14	3	56
5	S3 Luar Negeri	59	3	3	3	0	0	68
GRAND TOTAL		5.509	612	412	397	387	326	7.643

Sebagaimana Tabel 2.3 tersebut di atas, pada tahun 2006–2020, Pusbindiklatren telah melaksanakan program pendidikan kepada 7.643 orang (9,06 persen) dari total kebutuhan peserta program pendidikan sebanyak **84.280** orang.

Tabel 2.4 Pelaksanaan Pelatihan Pusbindiklatren Tahun 2006--2020

NO	PROGRAM	2006–2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
1	Pelatihan	5.291	659	1.269	1.066	1.458	725	10.468
2	Pelatihan Fungsional Perencana	3.946	535	510	530	423	559	6.503
3	Pelatihan SPIRIT	1191	319	1.149	-	-	-	2.659
4	<i>Workshop</i> PAK	300	50	50	50	25	-	475
5	<i>Workshop</i> APAK	300	50	50	50	25	-	475
GRAND TOTAL		11.028	1.763	3.228	1.846	1.931	1.284	20.580

Untuk program pelatihan, sejak tahun 2006–2020, Pusbindindiklatren telah menyelenggarakan pelatihan kepada 20.580 peserta atau sekitar 20,3 persen dari total kebutuhan peserta pelatihan bagi perencana nasional sebanyak **101.160** orang.

Dengan pertimbangan pengalaman dan sumber daya manusia serta dana yang tersedia, Kementerian PPN/Bappenas diharapkan dapat mencukupi kebutuhan PNS perencana berkualitas di pusat dan daerah sebanyak 10.000–15.000 orang dalam lima tahun atau rata-rata sekitar 500–750 orang per tahun untuk program pendidikan dan 1.500–2.250 orang per tahun untuk program pelatihan. Perhitungan ini dimasukkan

dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas sebagai sasaran kinerja utama Pusbindikatren Bappenas.

Tahun 2020, Kementerian PPN/Bappenas merencanakan dapat meluluskan karyasiswa program pendidikan sebanyak 250 orang yang terdiri atas program pendidikan dalam negeri, *linkage*, dan luar negeri. Komposisi jumlah karyasiswa tiap program dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel. 2.5 Rencana Kelulusan Karyasiswa

Program	Rencana Kelulusan Karyasiswa	
	2019	2020
Dalam Negeri	230	200
<i>Linkage</i>	50	40
Luar Negeri	20	10
Jumlah Kelulusan Pendidikan	300	250

Secara umum, dasar yang digunakan untuk menyusun rencana kerja adalah

1. **Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2014** tentang Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020–2024;
2. **Renstra Sekretariat PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2015-2019** halaman 14 Tabel 2 (*Cascading* Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas terhadap Indikator Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas). Namun, Pusbindikatren dalam pelaksanaannya menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra 2020 yang tertuang dalam Renstra Sekretariat PPN/Sekretariat Utama Bappenas Tahun 2020–2024 halaman 143 lampiran 1 (*Cascading* Indikator Kinerja Kementerian PPN/Bappenas terhadap Indikator Kinerja Setmen PPN/Settama Bappenas); dan
3. **Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-055.01.1.017312/2020 tanggal 12 November 2020.**

Perjanjian Kinerja Pusbindiklatren Tahun 2020

Kepala Pusbindiklatren telah menandatangani Perjanjian Kinerja (PK) pada tahun 2020 dengan target Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti yang tersaji pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6 IKU Pusbindiklatren 2020

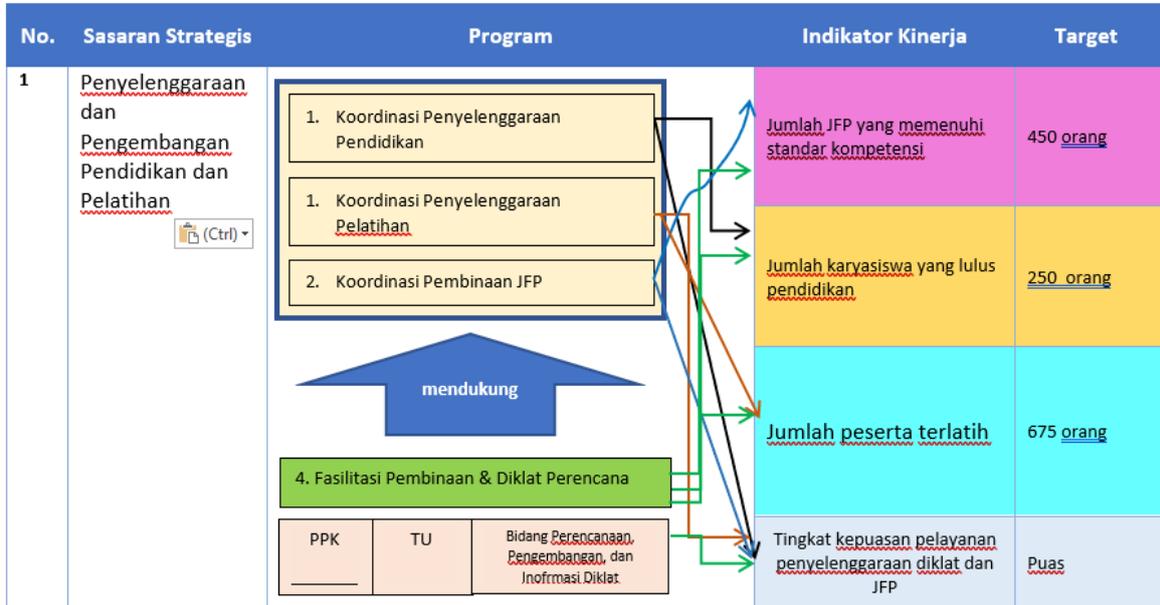
No.	Sasaran Kegiatan	Tahun 2020	
		Indikator Kinerja	Target 2020
1	Penyelenggaraan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	450 orang
		Jumlah Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan	250 orang
		Jumlah Peserta Terlatih	675 orang
		Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Puas

Penjelasan keempat IKU dalam PK Pusbindiklatren 2020 dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan target **450 orang**, yaitu jumlah calon dan Pejabat Fungsional Perencana di pusat dan daerah yang lulus uji kompetensi dalam Pelatihan Fungsional Perencana.
- b. Jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan dengan target **250 orang**, yaitu jumlah ASN perencana yang telah lulus dalam program pendidikan dan dikembalikan ke instansi asal karyasiswa tersebut.
- c. Jumlah peserta terlatih dengan target **675 orang**, yaitu jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat kelulusan.
- d. Tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat dan JFP dengan target **Puas**, yaitu skor kepuasan karyasiswa pendidikan dan peserta pelatihan, serta fasilitasi JFP terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pusbindiklatren, yang dilihat dari lima aspek: (1) penyebaran informasi; (2) pelayanan staf; (3) penempatan; (4) pendaftaran dan seleksi; dan (5) tunjangan.

1. Cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusbindiklatren 2020

Pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) Pusbindiklatren dimulai dengan menyusun pemetaan IKU Pusbindiklatren yang dijalankan oleh tiap-tiap bidang dengan indikator dan target yang telah ditetapkan seperti pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Pemetaan Cascading IKU Pusbindiklatren 2020

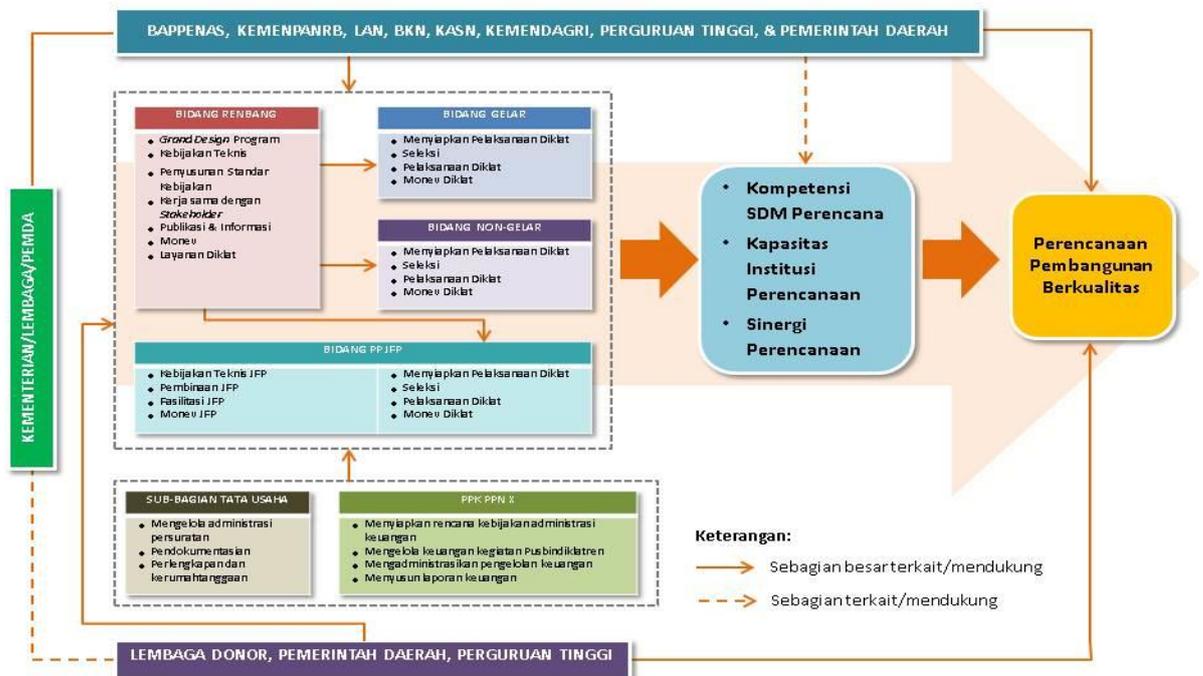
Dalam Gambar 2.1, Pusbindiklatren menjalankan tugasnya dengan mengacu pada beberapa hal berikut.

- Sasaran strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Sekretaris Kementerian PPN/Bappenas yang menyebutkan penyelenggaraan dan pengembangan Pendidikan dan pelatihan tersebut dijalankan oleh Kepala Pusbindiklatren dengan teknis pelaksanaan dilakukan oleh tiga kepala bidang (Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana, Bidang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Bidang Penyelenggaraan Pelatihan) dengan dukungan Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan, Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional (PPK Program PPN X), dan Kepala Subbagian Tata Usaha.
- Pengukuran program yang dijalankan oleh seluruh unit kerja di Pusbindiklatren diperlukan indikator kinerja. Pada tahun 2020, indikator kinerja Pusbindiklatren terdiri atas empat hal, yaitu (1) jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan target **450 orang**; (2) jumlah karvasiswa yang lulus program pendidikan dengan target **250 orang**; (3) jumlah peserta terlatih dengan target **675 orang**; dan (4) tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat dan JFP dengan target **Puas**.

- c. Kontribusi setiap bidang dalam pencapaian sasaran strategis, program, indikator kinerja dan target sebagai berikut:
- 1) Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana mendukung indikator kinerja jumlah Pejabat Fungsional perencana yang memenuhi standar kompetensi dan tingkat kepuasan pelayanan fasilitasi JFP;
 - 2) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan mendukung indikator kinerja jumlah karyawan yang lulus pendidikan dan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan;
 - 3) Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelatihan mendukung indikator jumlah peserta terlatih dan tingkat kepuasan pelayanan pelatihan; dan
 - 4) Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan, PPK Program PPN X, dan Kepala Subbagian Tata Usaha melalui fasilitasi pembinaan dan diklat perencana mendukung keempat indikator kinerja Pusbindiklatren.

2. Proses Bisnis (*Business Process*) Pusbindiklatren

Proses bisnis Pusbindiklatren dalam pencapaian tujuan nasional melalui Renstra Kementerian PPN/Bappenas maupun Renstra Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, sebagaimana dalam Gambar 2.2.



Gambar 2.2 Proses Bisnis Pusbindiklatren

Berdasarkan Gambar 2.2 di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Tugas Pusbindiklatren, yaitu melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Jabatan Fungsional Perencana, dan program pendidikan dan pelatihan kepada Kementerian PPN/Bappenas serta institusi pusat dan daerah di bidang perencanaan pembangunan nasional. Adapun fungsi Pusbindiklatren adalah penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan dan pembinaan profesi Jabatan Fungsional Perencana di pusat dan daerah.
- b. Pelaksanaan tugas tersebut dijalankan secara teknis oleh empat bidang: (1) Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi Diklat menyusun kebijakan, peraturan, pedoman, kurikulum, pengajar, fasilitas, metode, dan monev; (2) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana melakukan kegiatan pembinaan dan fasilitasi pengembangan JFP; (3) Bidang Penyelenggaraan Pendidikan menyelenggarakan program pendidikan; dan (4) Bidang Penyelenggaraan Pelatihan menyelenggarakan program pelatihan.
- c. Pelaksanaan tugas tersebut dilakukan untuk mencapai peningkatan (1) kompetensi SDM perencana; (2) kapasitas institusi perencanaan; dan (3) sinergi perencanaan untuk mencapai tujuan nasional;
- d. Tujuan nasional adalah perencanaan pembangunan berkualitas. Dalam mencapai tujuan tersebut Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan berbagai *stakeholder* antara lain Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komite Aparatur Sipil Negara (KASN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga donor.



BAB III.

AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA

Untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) perencana di seluruh Indonesia dan mempertimbangkan pencapaian jumlah kebutuhan perencana yang berkualitas, pada tahun 2020, Pusbindiklatren menargetkan menghasilkan lulusan program beasiswa pendidikan dan pelatihan sebanyak 925 orang dengan rincian program pendidikan sebanyak 250 orang dan program pelatihan sebanyak 675 orang. Jenis pendidikan yang ditawarkan pada tahun 2020 meliputi pendidikan (1) S-2 dalam negeri, (2) S-2 *linkage*; dan (3) S-3 dalam negeri. Sementara itu, program pelatihan terdiri atas (1) Pelatihan Substantif; (2) Pelatihan *Management of Training* (MOT); (3) *Workshop* Dana Alokasi Khusus (DAK); (4). *Workshop* Rencana Strategis (Renstra); (5) *Workshop* Perencanaan Pembangunan daerah (PPD); dan (6). *Workshop Clearing House*.

Selain melaksanakan program dan kegiatan diklat, Pusbindiklatren juga melaksanakan evaluasi internal untuk mengetahui dan mengidentifikasi masalah serta potensi masalah yang akan mengganggu pencapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi internal dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti rapat rutin internal, rapat koordinasi dengan pelaksana diklat (program studi atau lembaga/unit di perguruan tinggi), kunjungan langsung kepada karyasiswa dan peserta, evaluasi program Beasiswa SPIRIT, serta kegiatan lainnya.

Kinerja Pusbindiklatren pada tahun 2020 pada umumnya telah mencapai target, bahkan melampaui target yang direncanakan. Secara detail, capaian kinerja Pusbindiklatren dapat dilihat pada Tabel 3.1 yang mencakup (1) jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan target 450 orang dan jumlah realisasi sebanyak 559 orang (124,22 persen); (2) jumlah karyawan yang lulus program pendidikan dengan target 250 orang dan realisasi 334 orang atau sekitar 133,6 persen; (3) jumlah peserta terlatih dengan target 675 orang dan realisasi 725 orang (107,4 persen); serta (4) tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat dan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dengan target **Puas** melampaui target.

Tabel 3.1 Realisasi Kinerja Pusbindiklatren 2020

No.	Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Keterangan
1	Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel	Jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang Memenuhi Standar Kompetensi	450 orang	559 orang	Melebihi target
		Jumlah Karyawan yang Lulus Program Pendidikan	250 orang	334 orang	Melebihi Target
		Jumlah Peserta Terlatih	675 orang	725 orang	Melebihi target
2	Manajemen Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (Tersedianya Pelayanan dan Dukungan Proses Perencanaan Pembangunan Nasional yang Baik dan Bersih)	Tingkat kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), serta Jabatan Fungsional Perencana (JFP)	Puas	Sangat Puas	Melebihi Target

B. CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2020

1. Jumlah JFP yang Memenuhi Standar Kompetensi

Selaras dengan tugas dan fungsi (tusi) Pusbindiklatren sebagai instansi pembina Pejabat Fungsional Perencana nasional, Pusbindiklatren berkewajiban membina perencana di pusat maupun di daerah. Perencana yang dibina adalah Pejabat Fungsional Perencana dan calon pejabat fungsional yang mengikuti Pelatihan Fungsional Perencana dan telah lulus uji kompetensi.

Pada tahun 2020, jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi ditargetkan sebanyak 450 orang dan terealisasi 559 orang (124,22 persen) yang telah mengikuti pelatihan dan lulus uji kompetensi. Realisasi peserta Pelatihan Fungsional Perencana melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena kegiatan pelatihan diselenggarakan berbasis daring atau *online*.

Secara umum, terjadi peningkatan jumlah peserta Pelatihan Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan rincian sebagai berikut: (1) jenjang ahli pertama (target 200 orang, realisasi 200 orang); (2) jenjang ahli muda (target 200 orang, realisasi 240 orang); (3) jenjang ahli madya (target 100 orang, realisasi 99 orang); dan (4) jenjang ahli utama (target 10 orang, realisasi 20 orang). Perbandingan target dan realisasi kelulusan perencana dalam Pelatihan Fungsional Perencana sebagaimana tersaji pada Tabel 3.2 berikut.

Tabel.3.2 Perbandingan Tingkat Kelulusan Peserta Pelatihan Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020

Program	2019			2020		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
Kelulusan Pelatihan Fungsional Perencana	530	423	80	510	559	109
Ahli Pertama	220	118	54	200	200	100
Ahli Muda	200	221	111	200	240	120
Ahli Madya	100	72	72	100	99	99
Ahli Utama	10	12	120	10	20	200

Sumber: Laporan Pelaksanaan Pelatihan dan Uji Kompetensi Fungsional Perencana Tahun 2019 dan 2020

2. Jumlah Karyasiswa yang Lulus Program Pendidikan

Upaya mewujudkan ASN perencana yang berkualitas dilakukan melalui peningkatan kompetensi bagi aparatur yang dimaksudkan untuk meningkatkan penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan multidisiplin. Dengan mempertimbangkan jumlah kebutuhan ASN perencana yang berkualitas, pada tahun 2020, Pusbindiklatren merencanakan kelulusan karyasiswa program pendidikan sebanyak 250 orang.

Jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan dalam program pendidikan adalah karyasiswa yang lulus pendidikan gelar S-2 maupun S-3 pada tahun 2020, telah menyelesaikan studinya, dan secara resmi telah dikembalikan ke instansi asal karyasiswa tersebut.

Realisasi target program pendidikan dapat dicapai, meskipun pada tahun 2020 terdapat *outbreak* pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) yang mengharuskan semua program pendidikan dilakukan secara daring. Selain masalah pandemi Covid-19, kebijakan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. B/323/B.BI/SE/2019 tertanggal 31 Mei 2019 perihal Publikasi Karya Ilmiah Program Pascasarjana, Program Magister, dan Program Doktorat juga menjadi salah satu tantangan bagi mahasiswa untuk lulus tepat waktu.

Untuk merespons perkembangan perkuliahan yang terkendala akibat merebaknya Covid-19, Pusbindiklatren telah melakukan perbaikan dalam pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan. Beberapa perbaikan program pendidikan, yaitu (1) penyusunan ketentuan yang terkait dengan pembiayaan, pemberian paket data, dan komunikasi bagi mahasiswa program S-2/S-3 dalam negeri (serta *linkage*/luar negeri yang masih melakukan kuliah dari Indonesia) yang menjalankan perkuliahan secara daring; (2) mengalokasikan anggaran bagi mahasiswa *linkage* untuk menjalani tes *swab* sebelum mahasiswa tersebut berangkat ke luar negeri; (3) mengatur ketentuan tentang keputusannya mahasiswa dari luar negeri (mahasiswa *linkage*/reguler luar negeri) disesuaikan dengan protokol kesehatan Covid-19; (4) bersama-sama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA), Pusbindiklatren juga mengatur karantina mandiri bagi mahasiswa *linkage* yang tiba di Jepang; serta (5) pemberian *self-quarantine allowance* untuk mahasiswa *linkage*/luar negeri sesuai kebijakan negara tujuan. Sebagai bentuk antisipasi Covid-19 terhadap pelaksana program pendidikan, pada tahun 2020, Pusbindiklatren juga memberi kesempatan kepada program studi untuk mengajukan perpanjangan durasi studi selama satu semester jika memang hal tersebut sangat mendesak dilakukan.

Perbandingan jumlah peserta program pendidikan yang lulus pada tahun 2020 dan tahun 2019 disajikan dalam Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan Tingkat Kelulusan Mahasiswa Pendidikan 2019 dan 2020

Program	2019			2020		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	%	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	%
Dalam Negeri	230	239	104	200	230	115
<i>Linkage</i>	50	54	108	40	93	232
Luar Negeri	20	7	35	10	11	110
TOTAL	300	300	100	250	334	133.6

Sumber: Data Bidang Penyelenggaraan Pendidikan Tahun 2019 dan 2020

3. Jumlah Peserta Terlatih

Realisasi peserta pelatihan yang melebihi target dikarenakan adanya (1) kebijakan baru dari pimpinan untuk memberikan pelatihan kepada pegawai dalam rangka mendukung tuis Kementerian PPN/Bappenas, yaitu peningkatan kapasitas perencana daerah dalam menyusun dokumen perencanaan; (2) kebijakan penyelenggaraan pelatihan melalui daring.

Perbaikan yang dilaksanakan untuk pelatihan adalah (1) target peserta pelatihan lebih diprioritaskan kepada peserta dari daerah-daerah yang sedang dan akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pelatihan Perencanaan Pembangunan Daerah-Renana Pembangunan Jangka Menengah daerah/PPD-RPJMD); (2) target peserta Pelatihan *Public Private Partnership* (PPP) diarahkan kepada pemerintah daerah yang telah menjalankan proyek yang dikerjasamakan dengan badan usaha dengan mekanisme/proyek PPP; (3) memberikan Fasilitas Penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP) kepada pengelola kepegawaian daerah di kawasan timur Indonesia (KTI); dan (4) memberikan pelatihan perencanaan sesuai dengan kebutuhan daerah.

Tabel 3.4 Perbandingan Penyelenggaraan Pelatihan Tahun Anggaran 2019 dan 2020

Program	2019			2020		
	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)	Rencana (orang)	Realisasi (orang)	Persentase (persen)
Dalam Negeri	900	1.367	152	675	725	107
<i>Linkage</i>	0	0	0	0	0	0
Luar Negeri	100	141	141	0	0	0
TOTAL	1.000	1.508	150.8	675	725	107

Sumber: Data Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Tahun 2019 dan 2020

4. Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Diklat dan JFP

Tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi JFP diukur dengan menggunakan kesesuaian standar pelayanan Pusbindiklatren dengan standar pelayanan prima.

Pusbindiklatren melakukan survei kepuasan kepada para penerima beasiswa Pusbindiklatren, baik program pendidikan, pelatihan, maupun JFP. Jumlah responden program pendidikan pada tahun 2020 sebanyak 409 orang yang mengikuti program S-2 dalam negeri (program S-2 afirmasi dan program S-2 reguler) serta program S-2 *linkage* (*linkage* Jepang, *linkage* Premium, dan *split site*). Pertanyaan yang diajukan mencakup lima aspek penilaian, yaitu penyebaran informasi, pelayanan staf, penempatan, pendaftaran dan seleksi, serta tunjangan. Hasil penilaian sebagaimana terlihat dalam Tabel. 3.5.

Tabel 3.5 Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Karyasiswa Program Pendidikan 2019 dan 2020

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2019	2020
1	Penyebaran Informasi	91,08	 95,42
2	Pelayanan Staf	99,27	 99,57
3	Penempatan	97,80	 99,02
4	Pendaftaran dan Seleksi	98,35	 98,78
5	Tunjangan	85,33	 82,64
RATA-RATA		94,36	 95,08

Sumber: Data Simdiklat Pemantauan (Kuesioner Hasil *Briefing* Karyasiswa 2019)

Dari Tabel 3.5 di atas, terjadi kenaikan hasil capaian pelayanan program pendidikan dari hasil capaian tahun 2020. Dari lima indikator yang dinilai, hanya indikator tunjangan (biaya hidup) yang mengalami penurunan sebesar 2,7 poin. Hal ini dikarenakan pemberian tunjangan biaya hidup mengacu pada ketentuan standar biaya masukan (SBM) Kementerian Keuangan. Meskipun demikian, untuk program pendidikan, Pusbindiklatren melakukan penyesuaian besaran biaya pada komponen-komponen lainnya.

Tabel 3.6 Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Peserta Pelatihan 2019 dan 2020

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2019	2020
1	Penyebaran Informasi	98	-
2	Pelayanan Pusbindiklatren	96	 99,73
3	Penempatan	98	-
4	Pendaftaran dan Seleksi	94	 99,73
5	Fasilitas/Sarana	-	97,77
6	Kurikulum	-	98,76
RATA-RATA		96	 98,99

Sumber: Laporan *Monitoring* dan Evaluasi Bidang Penyelenggaraan Pelatihan Tahun 2019 dan 2020

Dari Tabel 3.6 di atas, pada tahun 2020, indikator penyebaran informasi dan indikator penempatan digabungkan dengan indikator pelayanan Pusbindiklatren. Pada tahun 2020 juga ditambahkan indikator fasilitas/sarana dan indikator kurikulum. Kenaikan terjadi pada program pelatihan dari capaian tahun 2019, untuk dua indikator yang dinilai. Kenaikan penilaian responden yang tertinggi adalah pada indikator pendaftaran dan seleksi, yaitu sebesar 5,73 persen. Hal ini dikarenakan Pusbindiklatren terus melakukan peningkatan efisiensi pelayanan *website* bagi calon peserta pelatihan. Sebanyak 485 dari 725 orang peserta pelatihan telah berhasil mengisi kuesioner dengan aplikasi Sipena. Namun, masih ada pelatihan yang belum menggunakan aplikasi Sipena sehingga peserta tidak dapat mengisi kuesioner. Dengan demikian, total kuesioner yang terisi sebanyak 66,89%.

Tabel 3.7 Perbandingan Hasil Penilaian Kepuasan Pelayanan Jabatan Fungsional Perencana 2019 dan 2020

No.	Indikator Penilaian	Nilai Capaian	
		2019	2020
1	Penyebaran Informasi	-	95,71
2	Pelayanan Staf	95,00	 97,00
3	Penempatan	-	96,60
4	Pendaftaran dan Seleksi	-	95,71
RATA-RATA		95,00	 96,23

Sumber: Aplikasi e-Tamu dan Pelaksanaan Pemantauan Pelatihan Fungsional

Pelaksanaan pembinaan JFP tahun 2020 salah satunya adalah melalui Pelatihan Fungsional Perencana yang diperuntukkan bagi para PNS yang baru pertama kali diangkat dan atau pindah jabatan ke dalam JFP serta bagi para perencana yang akan naik ke jenjang jabatan setingkat lebih tinggi dalam JFP. Dari Tabel 3.7 di atas, data responden yang diambil adalah sebanyak 559 dari peserta pelatihan dan 111 dari tamu yang berkunjung ke Pusbindiklatren selama periode tahun 2020. Selama tahun 2020, Pelatihan Fungsional Perencana diselenggarakan dengan metode daring dikarenakan adanya pandemi Covid-19 sehingga penilaian kepuasan juga dilaksanakan dengan metode pengisian formulir secara *online*.

5. Realisasi Anggaran Program Pusbindiklatren

Realisasi anggaran Pusbindiklatren pada tahun 2020 sebesar Rp172.388.147.844 atau 94,02 persen dari total anggaran sebesar Rp183.348.216.000 (seratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus enam belas ribu rupiah). Rincian realisasi anggaran (data 31 Desember 2020) sebagaimana Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Realisasi Anggaran 2020

	Pembiayaan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase
Loan	PHRD IV	114.102.000.000	104.047.272.665	91,2%
	COREMAP-CTI	8.213.800.000	8.180.460.582	99,6%
	Sub Total	122.315.800.000	112.227.733.247	91,8%
Rupiah Murni (RM)	Rupiah Murni	37.795.711.000	37.518.144.989	99,27%
	Rupiah Murni Lintas Bidang	1.420.320.000	1.420.320.000	100%
	Rupiah Murni Pendamping (RMP)	21.816.385.000	21.221.949.608	97,28%
	Sub Total	61.032.416.000	60.160.414.597	98,57%
	TOTAL	183.384.216.000	172.388.147.844	94,02%

Sumber: Laporan realisasi anggaran Pusbindiklatren 2020

Berdasarkan Tabel 3.8 dapat diketahui realisasi anggaran sebagai berikut.

- a. Realisasi anggaran PLN sebesar Rp112.227.733.247 (91,75 persen) dari total anggaran Rp122.315.800.000. Realisasi tersebut terdiri dari pinjaman *Professional Human Resources Development IV* (PHRD IV) dan Coremap.
- b. Realisasi RMP yang merupakan anggaran pendamping untuk program PHRD IV sebesar Rp21.221.949.608 (97,28 persen) dari anggaran sebesar Rp21.816.385.000, anggaran RMP digunakan untuk pembiayaan Pelatihan Bahasa, Pelatihan Substantif, dan Pelatihan Fungsional Perencana.
- c. Realisasi anggaran RM sebesar Rp38.938.464.989 (99,27 persen) dari anggaran sebesar Rp39.216.031.000.
- d. Anggaran Pusbindiklatren tersebut dilaksanakan oleh keempat bidang, PPK Program PPN X, dan Subbagian Tata Usaha dengan perincian sebagai berikut.
 - 1) Anggaran Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Informasi Diklat (Renbang Diklat) sebesar Rp3.043.567.000 dengan realisasi sebesar Rp3.028.376.959 (99,50 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan Penyusunan Panduan Pelaksanaan Proyek/Pengembangan Diklat, *Tracer Study*, Desain Program Pelatihan, Fasilitas Penyusunan HCDP, Penyusunan Manajemen Talenta ASN Perencana, Rintisan Program, Kebijakan Afirmasi Daerah, Sosialisasi JFP dan Diklat, *Workshop Big Data*, *Workshop* Penulisan Karya Tulis Ilmiah Tematik, *Workshop* Metodologi Penelitian bagi Pegawai Bappenas, Sosialisasi Pencegahan Narkoba, Pengelolaan Jurnal JISDeP, Pengembangan Aplikasi e-DUPAK, Pengembangan Aplikasi Sipena, Pengembangan Aplikasi Penyusunan HCDP, dan Penerbitan Majalah Simpul Perencana.

- 2) Anggaran Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP sebesar Rp14.388.005.000 dengan realisasi sebesar Rp14.078.364.038 (97,85 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan, seleksi jabatan fungsional perencana (tes materi dan uji kompetensi penyesuaian/*inpassing*), penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perencana, penyusunan peraturan JFP, Fasilitasi Lembaga Sertifikasi Profesi Perencana Pembangunan (LSP Renbang), dan Fasilitasi Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- 3) Anggaran Bidang Penyelenggaraan Pendidikan sebesar Rp125.432.511.000 dengan realisasi sebesar Rp123.259.893.178 (98,27 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan seleksi beasiswa; penyelenggaraan program pendidikan (pembayaran biaya pendidikan dan biaya hidup untuk program S-2/S-3 dalam negeri, S-2/S-3 luar negeri, S-2 *linkage*); pengendalian dan pemantauan; program peningkatan bahasa (biaya pelatihan dan biaya hidup untuk program *English for Academic Purposes/EAP*, *Basic Japanese Language Training/BJLT*); dan program COREMAP-CTI.
- 4) Anggaran Bidang Pelatihan sebesar Rp6.438.184.000 dengan realisasi sebesar Rp6.234.152.653; (96,83 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pelatihan (pelatihan substantif); seleksi pelatihan non-gelar; pemantauan dan evaluasi; serta magang dalam negeri.
- 5) Anggaran Subbagian Tata Usaha sebesar Rp1.603.105.000 dengan realisasi sebesar Rp1.572.778.722 (98,11 Persen). Anggaran ini digunakan untuk belanja bahan perkantoran, pengiriman surat dinas, pemeliharaan peralatan dan mesin, rapat evaluasi kinerja Pusbindiklatren, dan rapat koordinasi kesekretariatan.
- 6) Anggaran Sekretariat PPK Program PPN X sebesar Rp31.022.524.000 dengan realisasi sebesar Rp22.803.188.999 (73,51 persen). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan konsinyering (administrasi keuangan, *cost sharing*); pembayaran konsultan; pembayaran sewa; pembayaran jasa lainnya-tenaga administrasi; belanja bahan; dan biaya perjalanan.

Penyebab tidak maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan (1) pelatihan di luar negeri tidak dapat dilaksanakan karena pandemi sehingga dialihkan kegiatannya pada tahun 2021; (2) tertundanya keberangkatan karyasiswa S-2 ke Jepang karena menunggu pembukaan *border* di negara tersebut, keberangkatan juga harus dilakukan bertahap untuk proses isolasi mandiri di JICA Center.

Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Per Penanggung Jawab

Unit Kerja	Loan	RM	RMP	Total	
Anggaran (Rp)	0	3.043.567.000	0	3.043.567.000	
Bidang Renbang Diklat	Realisasi (Rp)	0	3.028.376.959	0	3.028.376.959
	Persentase	0,00%	99,50%	0,00%	99,50%

Unit Kerja		Loan	RM	RMP	Total
Bidang PP JFP	Anggaran (Rp)	0	507.620.000	13.880.385.000	14.388.005.000
	Realisasi (Rp)	0	435.448.063	13.642.915.975	14.078.364.038
	Persentase	0,00%	85,78%	98,29%	97,85%
Bidang Penyelenggaraan Pendidikan	Anggaran (Rp)	96.507.271.000	26.788.240.000	2.137.000.000	125.432.511.000
	Realisasi (Rp)	94.548.119.494	26.743.036.204	1.968.737.480	123.259.893.178
	Persentase	97,97%	99,83%	92,13%	98,27%
Bidang Penyelenggaraan Pelatihan	Anggaran (Rp)	0	639.184.000	5.799.000.000	6.438.184.000
	Realisasi (Rp)	0	623.856.500	5.610.296.153	6.234.152.653
	Persentase	0,00%	97,60%	96,75%	96,83%
Subbagian Tata Usaha	Anggaran (Rp)	0	1.603.105.000	0	1.603.105.000
	Realisasi (Rp)	0	1.572.778.722	0	1.572.778.722
	Persentase	0,00%	98,11%	0,00%	98,11%
PPK Program PPN X	Anggaran (Rp)	25.808.529.000	5.213.995.000	0	31.022.524.000
	Realisasi (Rp)	17.679.613.753	5.123.575.246	0	22.803.188.999
	Persentase	68,50%	98,27%	0,00%	73,51%
Lintas Bidang	Anggaran (Rp)	0	1.420.320.000	0	1.420.320.000
	Realisasi (Rp)	0	1.420.320.000	0	1.420.320.000
	Persentase	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
Total Anggaran Pusbindiklatren	Anggaran (Rp)	122.315.800.000	39.216.031.000	21.816.385.000	183.348.216.000
	Realisasi (Rp)	112.227.733.247	38.938.464.989	21.221.949.608	172.388.147.844
	Persentase	91,75%	99,29%	87,92%	94,02%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pusbindiklatren 2020

Perbandingan penyerapan anggaran pada tahun 2019 dan 2020 disajikan pada Tabel 3.10 di bawah ini. Realisasi anggaran pada tahun 2020 secara keseluruhan mengalami peningkatan menjadi 94,02 persen dengan anggaran yang lebih kecil dibanding tahun sebelumnya. Pemanfaatan anggaran dapat dimaksimalkan dengan adanya penyesuaian kegiatan pelatihan (Substantif, Penjenjangan Jabatan Fungsional Perencana, dan Bahasa Inggris) yang tetap dapat dilaksanakan secara daring/*online*, sehingga target kegiatan dapat tetap dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.

Tabel 3.10. Perbandingan Penyerapan Anggaran Tahun 2019 dan 2020

2019			2020		
Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase	Alokasi (Rp)	Penyerapan (Rp)	Persentase
237.477.215.000	216.761.710.197	91,28%	183.348.216.000	172.388.147.844	94,02%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Pusbindiklatren Tahun 2019 dan 2020

C. TINDAK LANJUT REKOMENDASI KEGIATAN TAHUN 2019

Hasil rekomendasi kegiatan Pusbindiklatren tahun 2019 yang telah ditindaklanjuti oleh Pusbindiklatren pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.11 di bawah ini.

Tabel 3.11 Tindak Lanjut Rekomendasi 2019

No.	Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut 2020	Dampak Tindak Lanjut
1	Mencari alternatif pembiayaan program diklat dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	Melakukan pertemuan dan diskusi dengan LPDP	Agar program kerja sama dengan LPDP dapat dilaksanakan, perlu disusun proposal program kerja sama
2	Menjalin kerja sama dengan skema dan bidang studi baru	Melakukan peninjauan kerja sama dengan Universitas Mulawarman (Unmul) dan Central Queensland University (CQU)	Perlu disusun rencana kegiatan kerja sama dengan Unmul dan CQU
3	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan IKU 2019 beserta kamus indikatornya, <i>cascading</i> tusi dan sasaran kinerja pegawai (SKP) masing-masing pegawai 2019	Sudah dilakukan 2020, tetapi perlu di- <i>update</i> tahun 2021	Melakukan penyusunan penyesuaian IKU 2021

No.	Rekomendasi 2019	Tindak Lanjut 2020	Dampak Tindak Lanjut
4	Aplikasi SIKAP telah selesai dikembangkan dan diterapkan di lingkungan Pusbindiklatren dan telah dilakukan penyempurnaan aplikasi SIKAP dengan mengintegrasikan realisasi anggaran dengan API aplikasi SIMBAR yang dimiliki oleh Biro Umum	Sudah diimplementasikan pada tahun 2020	Melakukan evaluasi penerapan
5	Peserta pelatihan sudah melakukan pengisian kuesioner secara elektronik	Sudah diimplementasikan pada tahun 2020	Melakukan evaluasi penerapan
6	Pelayanan fisik: surat-menyurat, kunjungan, konsultasi, dan bimbingan)	Sudah diimplementasikan pada tahun 2020	Melakukan evaluasi penerapan
7	Pelayanan nonfisik: media daring dan media sosial (SMS, Whatapp, Facebook, Instagram, Pos-el/e-mail)	Sudah diimplementasikan pada tahun 2020	Melakukan evaluasi penerapan.
8	Telah disusunnya Buku Panduan dan <i>Standard Operating Procedure</i> (SOP) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana serta Penyelenggaraan pendidikan dan Pelatihan Perencana	Sudah diimplementasikan pada tahun 2020	Melakukan evaluasi penerapan

D. INOVASI PUSBINDIKLATREN TAHUN 2020

Tahun 2020, Pusbindiklatren telah mengembangkan 11 inovasi untuk peningkatan kinerja, yaitu sebagai berikut.

1. **Pelatihan daring.** Pelatihan yang dilaksanakan pada tahun 2020, melalui metode daring dan tidak bertemu secara langsung, yang merupakan hal yang baru dalam pelaksanaan pelatihan di Pusbindiklatren. Pelatihan daring ini dilaksanakan agar aparatur perencana pusat dan daerah tetap dapat meningkatkan dan memperkaya wawasan dan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan perencanaan. Penerapan metode daring perlu didukung dengan aplikasi teknologi agar kegiatan pembelajaran dengan metode ceramah dan pembimbingan tetap dapat dilakukan secara efisien dan efektif.
2. **Pemantauan program pelatihan secara daring.** Penerapan pemantauan program pelatihan dilaksanakan secara daring perlu didukung dengan aplikasi teknologi agar pelaksanaan pemantauan pelatihan dapat berjalan efisien dan efektif.

3. **Briefing program pendidikan secara daring.** Program *briefing* untuk karyasiswa angkatan 2020 dilaksanakan secara daring. Hal ini dilakukan karena masih merebaknya pandemi Covid-19. Kegiatan *briefing* ini merupakan upaya Pusbindiklatren untuk memberikan informasi terkait dengan aturan dalam penyelenggaraan program pendidikan. Kegiatan *briefing* secara daring dilaksanakan dengan melibatkan program studi.
4. **Seleksi dan penyelenggaraan pendidikan secara daring.** Merebaknya pandemi Covid-19 pada bulan Maret 2020 menyebabkan kesulitan dalam pelaksanaan seleksi akademik (Tes Potensi Akademik/TPA dan *Test of English as a Foreign Language/TOEFL*). Pelaksanaan seleksi secara langsung sangat riskan dilakukan karena dapat menyebabkan terjadinya potensi penyebaran Covid-19. Oleh karena itu, Pusbindiklatren berinisiatif melakukan seleksi akademik secara daring. Seleksi TPA dilakukan bersama dengan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Tes Potensi Akademik Pascasarjana (PAPS), demikian juga pelaksanaan TOEFL juga dilakukan secara daring dengan provider tes tersebut.

Mengingat pandemi Covid-19 belum reda hingga pertengahan tahun 2020 maka pelaksanaan program pendidikan dilakukan juga dilakukan secara daring, baik bagi karyasiswa angkatan 2019 maupun angkatan 2020. Pelaksanaan perkuliahan secara daring ini telah menjadi keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kampus mitra Pusbindiklatren. Pada tahap awal, baik karyasiswa maupun tenaga pengajar mengalami kesulitan dalam adaptasi pembelajaran dari luring ke daring. Namun, program pembelajaran secara daring ini berjalan baik, meskipun dalam beberapa hal masih tetap diperlukan pertemuan tatap muka secara langsung.

5. **Pelaksanaan uji kompetensi *inpassing* dan tes materi JFP secara daring.** Pusbindiklatren telah menetapkan persyaratan seleksi pendaftaran Pelatihan Fungsional Perencana yang salah satunya adalah dengan penyelenggaraan tes materi Pelatihan Fungsional Perencana. Secara substansi, tes materi Pelatihan Fungsional Perencana yang selanjutnya disebut sebagai tes materi adalah salah satu syarat wajib yang harus diikuti oleh PNS yang akan diangkat pertama kali dan atau pindah jabatan ke dalam JFP untuk jenjang Ahli Muda Golongan III/c-III/d, Ahli Madya Golongan IV/a-IV/c, dan Ahli Utama Golongan IV/d-IV/e. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Perencana.

Sesuai dengan Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/*Inpassing* dalam Jabatan dan Angka Kredit Perencana sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional melalui Penyesuaian/*Inpassing*, salah satu syarat untuk dapat memangku JFP melalui penyesuaian/*Inpassing* adalah harus mengikuti dan lulus uji kompetensi.

Terkait dengan dengan kegiatan uji kompetensi penyesuaian/*inpassing* dalam JFP dan tes materi pelatihan fungsional perencana di atas, selama tahun 2020, diselenggarakan dengan mekanisme daring/*online* dikarenakan adanya pandemi Covid-19.

6. **Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perencana secara daring.** Dalam rangka memenuhi kriteria dan persyaratan memangku jabatan fungsional perencana yang terdiri atas empat jenjang, yaitu perencana ahli pertama, perencana ahli muda, perencana ahli madya, dan perencana ahli utama salah satu syaratnya adalah harus sudah mengikuti dan lulus uji kompetensi Pelatihan Fungsional Perencana. Selama tahun 2020 ini, Indonesia dan sebagian besar negara lain didunia sedang dilanda pandemi Covid-19. Oleh karena itu, penyelenggaraan Pelatihan Fungsional Perencana tidak dapat lagi dilakukan dengan mekanisme tatap muka luring atau pertemuan di kelas, tetapi dialihkan menjadi pelatihan berbasis daring.
7. **Pemantauan Pelatihan Fungsional Perencana secara daring.** Dalam rangka menjamin kualitas pelaksanaan pelatihan fungsional perencana baik kepada para peserta maupun pelaksana pelatihan, pada tahun 2020 ini Pusbindiklatren tetap menyelenggarakan pemantauan kepada para peserta maupun Prodi pelaksana pelatihan. Akan tetapi sama seperti kegiatan-kegiatan lainnya di tahun 2020 ini, selama pandemi *Corona Virus Desease* 2019 atau Covid-19, kegiatan pemantauan dilakukan dengan menggunakan mekanisme daring dengan mengirimkan tautan (*link*) *online survey* pelatihan fungsional perencana di minggu-terakhir pelaksanaan pelatihan.
8. **Revisi Kepmen PAN No. 16 tahun 2001 tentang JFP dan Angka Kreditnya menjadi Permen PAN-RB No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP).** JFP hingga saat ini masih berpedoman kepada Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KEPMENPAN) Nomor 16/KEP/M.PAN/03/2001 tentang Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dan Angka Kreditnya beserta beberapa peraturan turunannya sebagai dasar kebijakan dalam pelaksanaan JFP. Seiring dengan berjalannya waktu, peraturan-peraturan tentang JFP dirasakan perlu untuk direvisi dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan terhadap beberapa peraturan baru yang telah terbit dan menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pada tahun 2020, setelah melalui proses, Pusbindiklatren telah merevisi peraturan JFP. Dengan telah keluarnya Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana.
9. **Penyusunan dan terbitnya SE Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kebijakan Teknis JFP.** Salah satu langkah awal dalam rangka penjabaran Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Perencana, maka perlu disusun peraturan untuk mengisi masa transisi dalam rangka perubahan dari peraturan JFP lama kedalam peraturan baru. Selama masa transisi terhadap peraturan baru tentang JFP tersebut, Pusbindiklatren telah menyusun dan menerbitkan Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 Tentang

Kebijakan Teknis JFP yang didalamnya memuat penjelasan-penjelasan yang ada dalam Permen PAN dan RB Nomor 4/2020.

10. **Penyusunan dan terbitnya Permen PPN/Ka. Bappenas No. 12 Tahun 2020 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.** Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, maka Bappenas selaku Instansi Pembina JFP perlu menyusun aturan turunan dari Peraturan Menteri tersebut sebagai petunjuk teknis pelaksanaan standar kompetensi di bidang perencanaan pembangunan.

Di tahun 2020, Pusbindiklatren telah menyusun peraturan turunan dari Permenaker 12/2016 yaitu dengan terbitnya Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Perencanaan Pembangunan.

Dalam peraturan Menteri PPN tentang Penerapan KKNI bertujuan sebagai (a) pedoman dalam penyusunan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi; (b) pedoman dalam pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Kerja; (c) pengembangan sumber daya manusia Perencana Pembangunan; dan (d) pengakuan kesetaraan kualifikasi.

11. **Pengembangan Aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Perencana (SIKEREN).** Dalam rangka memudahkan dan menyederhanakan pelaksanaan tugas dan kegiatan penilaian angka kredit perencana, maka diperlukan suatu program/aplikasi berbasis elektronik (digital) yang dapat mengakomodasi semua bisnis proses kegiatan penilaian angka perencana oleh Tim Penilai dan para pemangku JFP. Dalam tahun 2020 ini, Pusbindiklatren mencoba membangun aplikasi penilaian angka kredit perencana tersebut.

Aplikasi yang dibangun oleh Pusbindiklatren tidak hanya sekedar untuk mengakomodir para Tim Penilai dan para pemangku JFP dalam hal penyusunan dan penilaian angka kredit (DUPAK), tetapi aplikasi ini disempurnakan dengan mengintegrasikan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Perencana didalamnya. Aplikasi ini selain sebagai program untuk input DUPAK secara digital, juga akan otomatis terintegrasi dengan SKP Perencana yang menjadi kontrak kerja pegawai dengan pimpinan diawal tahun kegiatan.

Kedepan aplikasi SIKEREN akan diintegrasikan dengan database PNS Perencana di BKN dan dapat dipergunakan oleh seluruh Instansi yang memiliki Tim Penilai dan pemangku fungsional perencana baik Pusat maupun Daerah.

12. **Sistem Informasi dan Pembelajaran Elektronik Perencana (SIPENA) dan WIFAST.** Sistem informasi dan pembelajaran elektronik perencana atau yang disebut SIPENA adalah sistem pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan pembangunan bagi peserta pelatihan dan pengajar secara dalam jaringan (daring). Sementara WIFAST adalah aplikasi yang terdapat di dalam SIPENA. Aplikasi WiFast berfungsi untuk pengelolaan dan penugasan

widyaiswara/pengajar pelatihan perencanaan Bappenas secara cepat, mudah dan transparan.

13. **Klinik ASN Perencana.** Klinik ASN Perencana adalah Sarana bagi para ASN Perencana di Instansi Pusat dan daerah untuk berkonsultasi mengenai Jabatan Fungsional Perencana, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencana, serta hal lain yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas yang diselenggarakan dua minggu sekali setiap bulannya melalui Daring atau online.
14. **Obrolan Djumat Pagi.** Obrolan Djumat Pagi (ODP) adalah forum *knowledge-sharing* yang bersifat egaliter sebagai sarana bertukar pikiran dan diskusi antara pimpinan dan seluruh pegawai Pusbindiklatren. ODP diselenggarakan setiap Jumat pagi secara daring dengan tema ODP yang berbeda-beda sesuai dengan isu yang sedang ingin dibicarakan atau kesiapan narasumber yang melakukan *knowledge sharing*.
15. **Penilaian Pegawai Pusbindiklatren.** Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu asset yang harus dikelola dengan benar dan tepat sehingga dapat mewujudkan tujuan organisasi, Pusbindiklatren telah melaksanakan Assessment untuk mengetahui GAP antar pegawai dan pengembangan yang diperlukan Pegawai dalam meningkatkan kapasitasnya.
16. **Penilaian Kementerian PANRB untuk Wilayah Bebas Korupsi.** Pusbindiklatren merupakan salah satu unit kerja yang diusulkan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagai unit kerja menuju Wilayah Bebas Korupsi, dan Pusbindiklatren telah memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi dari Kantor Kementerian PANRB.



BAB IV. PENUTUP



A. KESIMPULAN

1. Pada tahun 2020, Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi (1) jumlah Pejabat Fungsional Perencana yang memenuhi standar kompetensi dengan target 450 orang dan jumlah realisasi sebanyak 559 orang (124,22 persen); (2) jumlah karyasiswa yang lulus program pendidikan dengan target 250 orang dan realisasi 334 orang atau sekitar 133,6 persen; (3) jumlah peserta terlatih dengan target 675 orang dan realisasi 725 orang (107,4 persen); serta (4) tingkat kepuasan pelayanan penyelenggaraan diklat dan JFP dengan target puas melampaui target. Seluruh indikator yang ditetapkan oleh Pusbindiklatren tersebut telah terpenuhi dan melampaui target yang telah ditentukan
2. Realisasi anggaran pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp172.388.147.844 atau 94,02 persen dari alokasi sebesar Rp183.348.216.000. Walaupun terjadi pandemi Covid-19, beberapa kegiatan utama masih dapat dilaksanakan

dengan beberapa penyesuaian. Dengan demikian, dari sisi penyerapan anggaran tahun 2020 lebih baik dari tahun 2019.

3. Pusbindiklatren dalam tahun 2020 telah banyak melakukan perbaikan sebagai berikut.
 - a. **Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Informasi Pendidikan dan Pelatihan** telah melakukan
 - 1) **Pengembangan Kebijakan Peningkatan Kapasitas Institusi Perencanaan:** (a). Pengembangan Kebijakan (Kebijakan ASN Perencana dan Kebijakan ASN Berbasis Manajemen Talenta dalam rangka Pusbindiklatren sebagai Enabler Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Afirmasi Pusbindiklatren), (b). Fasilitasi Penyusunan HCDP dan Tenaga Ahli HCDP;
 - 2) **Perencanaan Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan:** (a). Perencanaan Pelaksanaan Program Diklat (Perbaikan AWP dan Kegiatan PHRD IV), (b). Koordinasi Deseminasi Perencanaan dan Kebijakan Program Diklat (Rapat Koordinasi), (c). Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Proyek/Kegiatan (Pedoman dan ToR Pelatihan Daring, Materi Ajar Pelatihan *Clearing House*, Konsep Pelatihan *HRM in Digitalized Era*);
 - 3) **Pengembangan Program dan Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan;** (a) Pengembangan Program Diklat Baru melalui Rintisan Program dan Proposal (Rintisan Program: Universitas Mulawarman, Pelatihan NTU, Mitra Pelaksana Program Coremap dan Linkage Premium, tiga Prodi SSMP AAI); Proposal: Fisip Unand, MBA QCU, SDGs Academy); (b) Pengembangan Kerja Sama Peningkatan Kapasitas SDM (pembaharuan NKB 14 Universitas Mitra PHRD IV, PHLN SMART, LPDP);
 - 4) **Evaluasi Kebijakan Teknis, Program, Materi dan Standar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencana:** (a) *Review* Desain dan Kurikulum Pelatihan; (b) *Tracer Study* Dampak Alumni Beasiswa SPIRIT; dan (c) *Tracer Study* Dampak Alumni Beasiswa SPIRIT;
 - 5) **Perencanaan, Pengembangan, dan Pengelolaan Sistem Informasi:** (a) Perencanaan Kebutuhan Sistem Informasi dan Pelayanan Informasi Diklat; (b) Pengembangan Sistem Informasi Diklat; (c) Pengelolaan Sistem Informasi; dan (d) Juknis Pengelolaan Sistem Informasi Diklat;
 - 6) **Pelayanan Informasi dan Publikasi terkait Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan:** (a) Internalisasi SOP Pusbindiklatren; (b) Sosialisasi JFP dan Diklat; (c) Bahan Informasi Kebijakan Diklat (*Booklet* dan Poster); (d) Majalah SIMPUL Perencanaan; (e) JISDEP; (f) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); (g) Reformasi Birokrasi (RB) dan Zona Integritas (ZI); (h) *Workshop Big Data* bagi Pegawai Kementerian PPN/Bappenas; (i) *Workshop* Penulisan dasar dan Lanjutan Penulisan Bagi Pegawai Kementerian

PPN/Bappenas; (j) *Workshop* Metodologi Penelitian Bagi Pegawai Kementerian PPN/Bappenas, *Sharing Session Workshop* Pendidikan dan Pelatihan; serta (k) Bimbingan Teknis Metode Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai di Pusbindiklatren.

- b. **Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana** menekankan kembali dalam Penawaran Pelatihan Fungsional Perencana tentang persyaratan kepada para pendaftar pelatihan yaitu (a) pendaftaran pelatihan harus satu pintu dari Kepegawaian/SDM; (b) menyertakan surat pernyataan dari Kepegawaian bahwa selambat-lambatnya selama enam bulan setelah lulus pelatihan, calon peserta akan diangkat ke dalam JFP; (c) menyertakan surat pernyataan dari Kepegawaian terkait dengan formasi kebutuhan JFP; (d) menyertakan surat pernyataan dari Kepegawaian terkait dengan rencana pengembangan kompetensi pegawai (HCDP).
- c. **Bidang Penyelenggaraan Pendidikan** telah melakukan perbaikan antara lain (a) penyesuaian pengalokasian tunjangan yang diperlukan terkait dengan perubahan model pendidikan dari pendidikan konvensional ke pendidikan secara daring; (b) mengantisipasi pandemi Covid-19, Pusbindiklatren mengalokasikan anggaran bagi karyasiswa linkage dan luar negeri untuk menjalani prosedur kesehatan yang diminta negara tujuan seperti tes *swab* dan karantina mandiri pada saat kedatangan di negara tujuan; (c) membuka peluang perpanjangan studi secara selektif bagi program studi yang betul-betul memerlukannya dengan alasan *force majeure* Covid-19;
- d. **Bidang Penyelenggaraan Pelatihan** telah melakukan perbaikan terkait dengan (a) target peserta pelatihan lebih diprioritaskan dari daerah yang sedang/akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pelatihan PPD-RPJM); (b) target peserta Pelatihan *Public Private Partnership* (PPP) diarahkan kepada daerah yang sudah memiliki ekonomi, sosial, lingkungan, infrastruktur spasial, dan topik lain secara multidisiplin terkait dengan perencanaan pembangunan berkelanjutan.mekanisme/proyek PPP; (3) memberikan *reward* pelatihan bagi daerah-daerah yang mendapatkan Penghargaan Pembangunan Daerah; dan (4) mempertimbangkan komposisi *gender* dalam pelaksanaan seleksi.
- e. **PPK Program PPN X** telah melakukan perbaikan berupa (1) pembuatan SOP terkait dengan mekanisme pencairan anggaran; (2) memaksimalkan perputaran penggunaan uang persediaan; (3) memaksimalkan peran verifikator internal untuk mengurangi ralat.

B. REKOMENDASI 2020 UNTUK RENCANA AKSI 2021

Secara umum rekomendasi tahun 2020 akan diupayakan diimplemetasikan pada tahun 2021 sebagai berikut.

1. Struktur organisasi dan mekanisme kerja terkait dengan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional.

2. Mendukung peran Kementerian PPN/Bappenas sebagai *enabler* pelaksanaan rencana pembangunan; melalui pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas perencanaan pusat dan daerah.
3. Peningkatan pelayanan terhadap para Pejabat Fungsional Perencana melalui aplikasi Sistem Penilaian Kinerja Perencana (SIKEREN).
4. Melakukan perbaikan dan penyempurnaan (a) IKU 2020 beserta kamus indikatornya; (b) IKU Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas 2020–2024; dan (c) *cascading* tusi dan SKP masing-masing pegawai 2020.
5. Penerapan nilai-nilai Zona Integritas di lingkungan Pusbindiklatren yang tidak hanya terbatas pada anggaran tetapi juga budaya kerja.
6. Penerapan SOP/mechanisme kerja Pusbindiklatren yang terintegrasi.

Jakarta, 15 Januari 2021

Kepala Pusbindiklatren



Dr. Guspika, M.B.A.



LAMPIRAN

LAMPIRAN 1:

Jumlah JFP yang Memenuhi Standar Kompetensi

Pelatihan Fungsional Perencana Pusbindiklatren Bappenas Tahun 2020

No.	Jenjang	Prodi/Center	Periode	Realisasi
1.	FP Pertama	LPEM FEB UI	21 Juli–5 September 2020	20
2.	FP Pertama	P2KP UNHAS	14 September – 30 Oktober 2020	20
3.	FP Pertama	FEB UNSYIAH	28 September – 5 November 2020 12 Oktober – 27 November 2020	20 20
4.	FP Pertama	PPS UNSRI	5 Oktober – 21 November 2020	20
5.	FP Pertama	MET FEB UNPAD	14 September – 30 Oktober 2020 19 Oktober – 4 Desember 2020	20 20
6.	FP Pertama	MAP UGM	7 September – 23 Oktober 2020	20
7.	FP Pertama	PWK SAPPK ITB	21 September – 7 November 2020	20
8.	FP Pertama	RCCP FIA UB	19 Oktober – 4 Desember 2020	20
JUMLAH PESERTA PELATIHAN FP PERTAMA (A)				200
1.	FP Muda	MET FEB UNPAD	5 Oktober – 6 November 2020 19 Oktober – 20 November 2020	20 20
2.	FP Muda	PWK SAPPK ITB	7 September – 9 Oktober 2020 14 September – 16 Oktober 2020 23 Oktober – 26 November 2020	20 20 20
3.	FP Muda	LPEM FEB UI	22 Juli – 25 Agustus 2020	20
4.	FP Muda	RCCP FIA UB	5 Oktober – 6 November 2020 12 Oktober – 13 November 2020	20 20
5.	FP Muda	MAP UGM	26 Oktober – 27 November 2020	20
6.	FP Muda	P2KP UNHAS	28 September – 30 Oktober 2020 6 November – 4 Desember 2020	20 20
7.	FP Muda	FEB UNSYIAH	19 Oktober – 20 November 2019	20
JUMLAH PESERTA PELATIHAN FP MUDA (B)				240
1.	FP Madya Eko	LPEM FEB UI	20 Juli – 7 Agustus 2020	20
2.	FP Madya Sos	MAP UGM	2 – 20 November 2020	20
3.	FP Madya Eko	P2KP UNHAS	2 – 20 November 2020	20
4.	FP Madya Spas	MPWK UGM	19 – 27 November 2020	19
5.	FP Madya Sos	P2KP UNHAS	2 – 20 November 2020	20
JUMLAH PESERTA PELATIHAN FP MADYA (C)				99
1.	FP Utama	LPEM – FEB UI	20 Maret – 15 Agustus 2020 22 April – 31 Agustus 2020	10 10
JUMLAH PESERTA PELATIHAN FP UTAMA (D)				20
JUMLAH KESELURUHAN PESERTA PELATIHAN FP TAHUN 2020 (A+B+C+D)				559

Sumber: Data Bidang Pembinaan dan Pengembangan JFP, Pusbindiklatren Bappenas

LAMPIRAN 2:

Jumlah Karyasiswa yang Lulus Pendidikan

NO	UNIVERSITAS	PROGRAM								JUMLAH
		S2 DN	Afirmasi	S2 LK	S2 SSMP	S2 LN	S2 Coremap	S3 DN	S3 LN	
1	Institut Pertanian Bogor	18								18
2	Institut Teknologi Bandung	7		16						23
3	Universitas Andalas	7								7
4	Universitas Brawijaya	26	1	15				1		43
5	Universitas Brawijaya			1						1
6	Universitas Diponegoro	23								23
7	Universitas Gadjah Mada	67	1	37						105
8	Universitas Hasanuddin	7			7					14
9	Universitas Indonesia	34		12						46
10	Universitas Indonesia			1						1
11	Universitas Padjadjaran	34		4						38
12	Universitas Padjadjaran	1								1
13	Universitas Syiah Kuala	2						1		3
14	Nagoya University					2			1	3
15	Ritsumeikan University								2	2
16	The University of Rhode Island						3			3
17	International University of Japan					1				1
18	Tohoku University					2				2
TOTAL		226	2	86	7	5	3	2	3	334

LAMPIRAN 3: Jumlah Peserta Terlatih

No	Prodi	Topik	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1	RCCP UB	RPJMD	14–25 September 2020	25
2	UNHAS	RPJMD	14–25 September 2020	27
3	FE UNAND	<i>Planning and Budgeting</i>	14–25 September 2020	25
4	LPEM UI	<i>Planning and Budgeting</i>	21 September–2 Oktober 2020	25
5	MAP UGM	RPJMD	21 September–2 Oktober 2020	25
6	FE UNSYIAH	RPJMD	28 September–9 Oktober 2020	25
7	UTM	RPJMD	28 September–9 Oktober 2020	25
8	MIL UNDIP	Perencanaan Lingkungan	5–16 Oktober 2020	25
9	GEO INFO UGM	Manajemen Bencana	12–23 Oktober 2020	24
10	MPWK UNDIP	PPP	12–23 Oktober 2020	24
11	MPWK UGM	LERD	12–23 Oktober 2020	25
12	PPs UNSYIAH	Monev	12–23 Oktober 2020	19
13	LP3E UNPAD	RPJMD	12–23 Oktober 2020	25
14	PPS UNSRI	RPJMD	19–30 Oktober 2020	24
15	RCCP UB	LERD	2–13 November 2020	23
16	UNHAS	RPJMD angk 2	2–13 November 2020	25
17	MPWK ITB	<i>City Planning</i>	2–13 November 2020	25
18	MPWK UNDIP	<i>City Planning</i>	2–13 November 2020	25
19	MPWK UGM	PPP	2–13 November 2020	22
20	LEMTEK UI	Kelayakan Proyek	2–13 November 2020	22
21	MIL UNPAD	Perencanaan Lingkungan	2–13 November 2020	22
22	UNIPA	RPJMD	2–13 November 2020	24
23	FE UNAND	RPJMD	9–20 November 2020	25
24	PPS UNSRI	RPJMD	16–27 November 2020	25
25	UNCEN	RPJMD	16–27 November 2020	25
26	MEP UGM	Perencanaan Penganggaran	16–27 November 2020	25

No	Prodi	Topik	Waktu Pelaksanaan	Jumlah Peserta
27	MPWK ITB	<i>City Planning</i>	16–27 November 2020	25
28	PPs UNSYIAH	Manajemen Bencana	16–27 November 2020	23
29	LP3E UNPAD	Perencanaan Penganggaran	16–27 November 2020	26
30	MPWK UGN	Monev	23 November–4 Desember 2020	23
31	Pusbiindiklatren	<i>Workshop</i> Renstra 1	19–22 Oktober 2020	35
32	Pusbindiklatren	<i>Workshop</i> Renstra 2	16–19 Novemebr 2020	32
33	Pusbindiklatren	<i>Workshop</i> PPD	23–27 November 2020	31
34	Pusbindiklatren	<i>Workshop Clearing House</i>	7, 8, dan 10 Desember 2020	34
JUMLAH				860

LAMPIRAN 4:

Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, serta Jabatan Fungsional Perencana

4.1 PENDIDIKAN

No.	Indikator	Tingkat Kepuasan					Jumlah	% Kepuasan
		SP	P	BB	TP	STP		
1	Penyebaran Informasi	107	196	80	21	5	409	93,64%
2	Pelayanan Staf	177	207	22	2	0	409	99,57%
3	Penempatan	199	159	47	4	0	409	99,02%
4	Pendaftaran dan Seleksi	216	161	27	5	0	409	98,78%
5	Tunjangan	39	162	137	62	10	409	82,64%

4.2. PELATIHAN

No.	Pertanyaan	Tingkat Kepuasan					Jumlah	% Kepuasan
		SP	P	BB	TP	STP		
A	LAYANAN PUSBINDIKLATREN							99,73%
1	Penyebaran informasi yang dilakukan Pusbindiklatren	273	193	17	2	0	485	99,59%
2	Akses terhadap media informasi Pusbindiklatren	253	218	13	1	0	485	99,79%
3	Kualitas pelayanan informasi staf Pusbindiklatren	238	222	24	1	0	485	99,79%
B	PROSES SELEKSI							99,73%
1	Pendaftaran pelatihan dilakukan berbasis <i>web (online)</i>	255	213	18	0	0	486	100,00%
2	Proses seleksi (<i>atihanency, fair and clear</i>)	241	216	26	2	0	485	99,59%
3	Penempatan di pelaksana pelatihan	206	246	31	2	0	485	99,59%
C	FASILITAS/SARANA							97,77%
1	Penggantian kuota internet sesuai dengan yang digunakan	220	184	59	11	11	485	95,46%
2	Kualitas gambar/video dan suara dari pelaksana dan pengajar sudah baik	184	249	44	6	2	485	98,35%

No.	Pertanyaan	Tingkat Kepuasan					Jumlah	% Kepuasan
		SP	P	BB	TP	STP		
3	Kualitas pelayanan informasi	226	228	24	3	4	485	98,56%
4	Kesesuaian jadwal dengan pelaksanaan pelatihan	213	230	32	7	3	485	97,94%
5	Aplikasi SIPENA membantu dalam pelaksanaan pelatihan	215	226	37	4	3	485	98,56%
D	KURIKULUM							98,76%
1	Penyajian materi sudah runtut dan sistematis	191	256	31	5	2	485	98,56%
2	Materi yang disampaikan jelas dan mudah dimengerti	184	267	27	6	1	485	98,56%
3	Isi pelatihan proposional antara konsep/teori dengan atihan/praktek perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan	184	254	37	7	3	485	97,94%
4	Materi pelatihan bermanfaat untuk diterapkan di instansi perencanaan	246	227	9	3	0	485	99,38%
5	Materi yang disampaikan sesuai dengan tujuan pelatihan	248	222	12	1	2	485	99,38%

4.3. JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

APLIKASI TAMU PUSBINDIKLATREN (E-TAMU)

No.	Tahun	STP	TP	P	SP	JUMLAH
1	2019	2	7	20	152	181
2	2020	1	2	5	103	111

1. ASPEK PESERTA

1.1. Peserta Paham Sasaran Materi Pelatihan Ini dengan Jelas

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	1	111	88	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	2	134	104	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	35	64	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	11	9	20
	JUMLAH	0	3	291	265	559

1.2. Menurut Peserta Sasaran dari Pelatihan Telah Tercapai

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	8	114	78	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	4	122	114	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	39	60	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	7	13	20
	JUMLAH	0	12	282	265	559

1.3. Materi Pelatihan dapat Memenuhi Kebutuhan Para Perencana

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	7	98	95	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	2	102	136	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	32	67	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	9	11	20
	JUMLAH	0	9	241	309	559

1.4. Materi Pelatihan Bermanfaat Bagi Peserta dalam Menghadapi Pekerjaan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	9	93	98	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	2	96	142	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	32	67	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	6	14	20
	JUMLAH	0	11	227	321	559

1.5. Materi Pelatihan Dapat Peserta Terapkan di Unit Kerja

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	13	114	73	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	6	110	124	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	1	41	57	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	11	9	20
	JUMLAH	0	7	162	190	559

2. ASPEK INSTRUKTUR

2.1. Instruktur Menguasai Materi Pelatihan yang Disampaikan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	1	95	104	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	2	102	136	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	30	69	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	8	12	20
	JUMLAH	0	3	235	321	559

2.2. Instruktur Menyampaikan Materi Pelatihan dengan Jelas

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	1	4	105	90	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	4	126	110	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	43	56	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	12	8	20
	JUMLAH	1	8	286	264	559

2.3. Instruktur Menciptakan Suasana yang Kondusif

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	16	92	92	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	2	118	120	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	31	68	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	8	12	20
	JUMLAH	0	18	249	292	559

2.4. Instruktur Mampu Memenuhi Kebutuhan Pelatihan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	13	99	88	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	3	127	110	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	42	57	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	10	10	20
	JUMLAH	0	16	278	265	559

2.5. Instruktur Mampu Mempertahankan Perhatian dan Ketertarikan Peserta Terhadap Materi Pelatihan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	19	103	78	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	14	134	92	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	1	34	64	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	1	8	11	20
	JUMLAH	0	35	279	245	559

3. ASPEK METODE

3.1. Metode yang Digunakan dalam Pelatihan Sudah Tepat

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	11	121	68	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	5	141	94	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	48	51	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	9	11	20
	JUMLAH	0	16	319	224	559

3.2. Perbandingan antara Diskusi dan Pembahasan Sesuai dengan Kebutuhan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	9	106	85	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	8	128	104	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	38	61	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	3	10	7	20
	JUMLAH	0	20	282	257	559

3.3. Metode Penyajian Sesuai dengan Kebutuhan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	7	110	83	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	4	131	105	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	37	62	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	7	13	20
	JUMLAH	0	11	285	263	559

3.4. Diskusi dan Pembahasan Dapat Dimengerti

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	5	117	78	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	4	128	108	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	42	57	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	9	11	20
	JUMLAH	0	9	296	254	559

3.5. Suasana Selama Diklat Dirasakan Hidup dan Menarik

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	13	112	75	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	11	116	113	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	31	68	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	6	14	20
	JUMLAH	0	24	265	270	559

4. ASPEK MATERI

4.1. Materi yang Disajikan Sesuai dengan Topik Pelatihan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	3	98	99	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	0	109	131	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	36	63	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	8	12	20
	JUMLAH	0	3	251	305	559

4.2. Materi yang Disajikan Menarik Untuk Dipelajari

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	5	98	97	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	0	111	129	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	36	63	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	8	12	20
	JUMLAH	0	5	253	301	559

4.3. Materi yang Disajikan Merupakan Pengetahuan Baru

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	9	94	97	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	6	109	125	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	1	34	64	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	12	8	20
	JUMLAH	0	16	249	294	559

4.4. Materi yang Disajikan Mudah Dipahami

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	6	123	71	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	11	141	88	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	48	51	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	9	11	20
	JUMLAH	0	17	321	221	559

4.5. Materi yang Disajikan Dapat Diterapkan dalam Menunjang Pekerjaan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	8	105	87	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	6	119	115	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	34	65	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	3	9	8	20
	JUMLAH	0	17	267	275	559

5. ASPEK PENYELENGGARA PELATIHAN

5.1. Pelayanan dan Penyebaran Informasi Pelatihan Menarik dan Jelas

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	8	138	54	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	13	121	106	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	3	47	49	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	9	11	20
	JUMLAH	0	24	315	220	559

5.2. Proses Pendaftaran dan Seleksi Pelatihan Sudah Sesuai Ketentuan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	9	106	85	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	8	128	104	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	38	61	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	2	10	8	20
	JUMLAH	0	19	282	258	559

5.3. Penempatan Staf Sudah Sesuai dan Transparan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	11	110	79	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	8	127	105	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	5	35	59	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	7	13	20
	JUMLAH	0	24	279	256	559

5.4. Staf Penyelenggaran Pelatihan Paham dan Menguasai Substansi Pelatihan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	5	117	78	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	4	128	108	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	42	57	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	9	11	20
	JUMLAH	0	9	296	254	559

5.5. Staf ramah dalam memberikan pelayanan

No.	Pelatihan	STS	TS	S	SS	JUMLAH
1	PELATIHAN FP PERTAMA	0	13	112	75	200
2	PELATIHAN FP MUDA	0	11	116	113	240
3	PELATIHAN FP MADYA	0	0	31	68	99
4	PELATIHAN FP UTAMA	0	0	6	14	20
	JUMLAH	0	24	265	270	559

Referensi:

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024;
2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Kepala Bappenas) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PPN/Bappenas;
3. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024.



**Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana
(Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas**

Alamat: Jalan Proklamasi No. 70, Jakarta 10320
Telepon: (021) 319 28280, 319 28285, 319 28279
Faksimile: (021) 319 28281
Pos-el: pusbindiklatren@bappenas.go.id
Situs Web: www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

  Pusbindiklatren Bappenas   @pusbindiklatren